

## **KARYA TULIS**

# **Transparency in Decision-Making of Omnibus Law Using Big Data**

**Mata Kuliah :  
Intro to Business Intel. & Enterprise DB**



**Diusulkan oleh:**

**Afina Putri Dayanti – 825200049**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS TARUMANEGARA  
JAKARTA  
2020**

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa minggu yang lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan pengesahan *omnibus law* cipta kerja secara mendadak. *Omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sejak disahkannya oleh DPR RUU *Omnibus law* Cipta Kerja terus menerus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap sangat merugikan para buruh.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan isi *omnibus law* RUU Cipta Kerja tertera jelas sangat merugikan pekerja. Beberapa hal yang merugikan yaitu terkait persyaratan tambahan UMK terkait upah minimum, pemotongan pesangon, penghapusan hak cuti atau kompensasi khusus, peraturan *outsourcing* yang semakin tidak jelas, dan ruang bagi pengusaha untuk mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu. Afif Johan, Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, juga mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan dan pengambilan keputusan RUU *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja. Hal ini dinilai terlalu mendesak. Menurut Survei Charta Politika sebanyak 83,1 persen responden bahkan tidak mengetahui rencana pemerintah menerbitkan *omnibus law*. Inilah yang menjadi *concern* dalam karya ilmiah *Transparency in Decision-Making Omnibus Law Using Big Data*.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mensyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk diberi tahu tentang segala aktivitas *data processing* pribadi mereka. Dalam konteks *big data*, ini juga mengacu pada transparansi *big data analytics*, yaitu seluruh ekosistem analitik data besar, algoritme yang digunakan untuk membuat prediksi tentang individu, dan proses pengambilan keputusan.

Transparansi terkait aktivitas *data processing* dan *big data analytics* dapat meningkatkan kepercayaan individu dalam aktivitas pemrosesan dan teknologi yang digunakan. Selain itu, ini juga memastikan alat yang lebih aman karena transparansi memungkinkan individu untuk memverifikasi kesimpulan yang diambil dan memperbaiki kesalahan. Maka dari itu *Big Data* menjadi solusi yang baik dimana diharapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia terlebih dimasa *pandemic Covid-19*.

## 2. GAGASAN

### a) Kondisi terkini pencetus gagasan

Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, menyoroti cacatnya prosedural pembentukan Undang-undang atau UU Cipta Kerja. *Omnibus Law* ini menjadi salah satu bukti Pemerintah dan DPR tidak serius dalam membuat produk hukum. Ditambah persentase tingkat gelombang demonstrasi masyarakat menolak *Omnibus Law* terus naik. Aksi unjuk rasa mulanya berlangsung damai namun semakin lama berubah menjadi ricuh karena lambatnya *feedback* dari pemerintah, akibatnya sejumlah fasilitas public banyak yang rusak. Moeldoko menyebutkan penyusunan RUU Cipta Kerja sebelumnya sudah didiskusikan oleh DPR dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya. Hal itu sesuai dengan kaidah yang sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi. Namun serikat buruh masih belum menerima, menilai pembahasan RUU seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya kaum buruh, dalam pembahasannya. Nyatanya kaum buruh tidak diikutsertakan dan tidak ada transparansi hasil pembahasan maupun keputusannya Hal inilah yang menimbulkan kecurgiaan aturan tersebut ditumpangi suatu kepentingan tertentu.

### b) Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan

Saat gemparnya *omnibus law* anggota Baleg (Badan Legislatif) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang menyampaikan bahwa sebenarnya draft UU Omnibus Law Cipta Kerja ini belum final dan masih dirapikan. Kata dirapikan seolah-olah dijadikan solusi agar masyarakat tenang. Padahal Naskah UU Cipta Kerja yang belum rapi lalu direvisi itu dianggap aneh oleh berbagai pihak. Aturan yang sudah mendapat persetujuan dari badan legislasi, semestinya tidak dapat diutak-atik lagi. Sebab, naskah RUU yang disahkan di rapat paripurna merupakan naskah yang akan dibawa ke tahap pengundangan dan akan diberikan nomor undang-undang.

### c) Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan

*Government case* membuktikan pentingnya implementasi *big data* dalam sistem informasi. Salah satunya adalah masalah transparansi publik. Seperti yang kita ketahui, melalui proses yang transparan, publik memiliki fungsi kontrol yang lebih baik terhadap berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah. Hal tersebut akan mendorong meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pertanyaannya apakah *big data* bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan transparansi jika dikembangkan lebih lanjut?

Jawabannya adalah iya. *Big data* digunakan dengan menggunakan pendekatan *analytics*, sehingga hasilnya lebih *structural* dan data tersebut nantinya akan menunjukkan fakta-fakta dilapangan. Peran *big data* sendiri bagi pemerintahan atau layanan publik dinilai sangat penting karena bisa mengalihkan data eksternal menjadi sebuah fakta. Kemudian menafsirkan fakta tersebut menjadi sebuah kebijakan yang nantinya akan menunjang kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi. Dengan fakta-fakta yang didapat dari *big data* tersebut pemerintah dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama dalam membuat sebuah kebijakan dan tentunya sudah diukur secara *analytics* sesuai kebutuhan *long-term* masyarakat.

**d) Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya**

*Big data* semakin berpotensi apabila terdapat banyak data yang ditambah, sehingga akan dapat diolah instansi manapun. Pengelolaan *big data* tidak bisa sembarangan, perlu adanya sumber daya profesional dan teknologi komputasi terbaru yang mendukungnya melakukan akses, kelola, dan simpan data. Hal tersebut memerlukan solusi terintegrasi menggunakan pemahaman khusus mengenai *big data analytics*.

Dalam implementasinya *big data* biasanya sering terjadi kendala pada change management organisasi di dalam. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen tinggi untuk mengawal proses management di dalamnya. Karena ini menyangkut data yang besar dan kompleks maka dibutuhkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengimplementasikannya, seperti Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN), dan Badan Pusat Statistik.

**e) Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai**

Big Data mencakup area yang sangat luas, untuk mengimplementasikan gagasan ini terdapat tiga langkah-langkah strategis, yaitu

- 1) Mengatur Strategi IT Management dan Tata Kelola
  - a. IT Management

*Big Data* di era saat ini merupakan trend teknologi untuk membuat keputusan. Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan data dalam volume yang sangat besar, terstruktur / tidak terstruktur dan bervariasi.

b. Tata Kelola IT dengan framework COBIT 5

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah framework yang diciptakan oleh ISACA untuk mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara :

- Menopang seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise
- Struktur organisasi menopang seluruh stakeholders, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi

2) Mempetakan Sumber Daya Manusia

Karena kompleksitas dari sistem *big data*, dibutuhkan pula pemetaan SDM yang baik sehingga bisa meng-*cover* kemampuan teknis untuk mengimplementasikannya. Secara garis besar terdapat 4 hal terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan *big data*, yaitu :

a. Data Collection

Data collection adalah proses pengumpulan data. Kompetensi SDM yang diperlukan diantaranya Data APIs, SQL dan Data Modeling.

b. Data Warehouse

Data warehouse digunakan untuk melakukan integrasi dari berbagai system. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya Relational Databases (MySQL, MS SQL Server, Oracle, DB2, dsb) dan NoSQL (HBase, SAP HANA, HDFS, Cassandra, MongoDB, CouchDB, Vertica, Greenplum, Pentaho, Teradata, dsb.)

c. Data Transformation

Data transformation adalah proses mengubah format, struktur, atau nilai data agar dapat dianalisis dengan baik. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya ETL Tools (Informatica, DataStage, SSIS, Redpoint, dsb) dan Scripting (Linux/Unix commands, Python, Ruby, Perl, dsb.)

d. Data Analysis

Tahapan terakhir yaitu menganalisis data dimana proses menerapkan teknik statistik dan / atau logika secara sistematis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, memadatkan dan merekap, dan mengevaluasi data.. Kompetensi yang dibutuhkan diantaranya Data mining atau machine learning (Mahout, Neural Network, dsb.), Statistical analysis software (R, SPSS, SAS, Weka, MATLAB, dsb.) dan Programming skills (Java, Scala, Ruby, C++, dsb.)

### 3) Menetapkan System

Hal terpenting dalam penggunaan *big data* adalah perencanaan system yang matang sehingga dapat menetapkan system organisasi yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi penerapan *big data* di Pemerintahan adalah sebagai berikut

- Ketersediaan Data
- Standarisasi Data Pemerintah
- Privasi Data
- Kompetensi SDM
- Infrastruktur Penunjang

## 3. KESIMPULAN

*Big data* merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan pola dan korelasi yang mungkin tidak jelas pada awalnya, tetapi berpeluang menjadi berguna dalam pengambilan keputusan pada sektor pemerintahan. Dengan menggunakan *big data analytics* keputusan pemerintah dapat cepat teridentifikasi. *Big data analytics* jika dieksekusi dengan cara yang tepat akan membantu pemerintah dalam memanfaatkan data dan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Pada akhirnya hal tersebut bisa menghasilkan keputusan bergerak lebih cerdas dan cepat karena didukung oleh pihak-pihak yang kompeten dan operasional yang lebih efisien. Dari sisi *impact* pun *big data* akan membawa keuntungan yang lebih tinggi ke segala aspek masyarakat karena keputusannya yang tepat.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Eril. (2019). *Big Data: Sejarah, Cara Kerja dan Penerapannya Pada Bisnis*. Retrieved from Gudang SSL: <https://gudangssl.id/big-data/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Handayani, E. (2016). *GAGASAN : Big Data Dan Transparansi Publik*. Retrieved from Solopos.com: <https://www.solopos.com/gagasan-big-data-dan-transparansi-publik-688172>. Diakses tanggal 23 Oktober 2020.
- Julien Debussche, J. C. (2019). *Big Data & Issues & Opportunities: Transparency, Consent, Control and Personal Data Ownership*. Retrieved from Bird & Bird: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-and-opportunities-transparency-consent-control-and-personal-data-ownership>. Diakses tanggal 20.
- Maesaroh, R. (2016). *Big Data*. Retrieved from <http://sim-bigdata1-riamaesaroh-septialutfi.blogspot.com/2016/12/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Rafie, B. T. (2020). *Peneliti LIPI: Omnibus Law Cipta Kerja jelas-jelas merugikan pekerja*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/peneliti-lipi-omnibus-law-cipta-kerja-jelas-jelas-merugikan-pekerja-1>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Sutiawan, I. (2020). *Omnibus Law, Serikat Pekerja: Pemerintah Tak Transparan*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/469057/ekonomi/omnibus-law-serikat-pekerja-pemerintah-tak-transparan>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Taru, A. (2019). *Dampak Big Data pada Sistem Pemerintahan*. Retrieved from GameLab Indonesia: <https://www.gamelab.id/news/128-dampak-big-data-pada-sistem-pemerintahan>. Diakses tanggal 23.
- W, T. E. (2020). *Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah*. Retrieved from Kanwil Jogja: <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4621-implementasi-big-data-pada-instansi-pemerintah>. Diakses tanggal 24 Oktober 2020.
- Yasmin, P. (2020). *Mengenal Apa Itu Omnibus Law yang Jadi Kontroversi*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5200381/mengenal-apa-itu-omnibus-law-yang-jadi-kontroversi>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Zahir, F. (2019). *Apa itu Big Data dan Bagaimana Cara Kerjanya*. Retrieved from Alterra Bills: <https://bills.alterra.id/apa-itu-big-data-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Zhacky, M. (2020). *Survei Charta Politika: 83,1% Tak Tahu Rencana Penerbitan UU Omnibus Law*. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4957549/survei-charta-politika-831-tak-tahu-rencana-penerbitan-uu-omnibus-law>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.